



LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS PERTANIAN PERIKANAN
DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah Mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/ komunikasi terhadap capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus dapat di pertanggungjawabkan dan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah mengandung penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok, serta berguna bagi semua pihak

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KOTA SOLOK



JEFRIZAL, S.Pt. MT
NIP. 19680522 199403 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	3
1.3 Penghargaan	7
1.4 Kewenangan dan Data Umum Organisasi	8
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	22
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan Tahun 2015	29
3.3 Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV. PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon	10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	20
Tabel 3.1 Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Peroduktifitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	23
Tabel 3.2 Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Peroduktifitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	26
Tabel 3.3 Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha Agribisnis	27
Tabel 3.4 Realisasi Akumulasi Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha Agribisnis	27
Tabel 3.5 Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Sektor Pertanian	28
Tabel 3.6 Realisasi Akumulasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Sektor Pertanian	29
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015	29
Tabel 3.8 Realisasi SPJ Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Tahun 2016	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing – masing lembaga- lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan Kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja/pemanfaatan informasi kinerja. Pelaporan kinerja sebagai sub pada SAKIP diwujudkan melalui penyajian Laporan Kinerja . Sementara secara substantif, dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Keberhasilan/kegagalan yang di capai merujuk kepada target yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Laporan Kinerja berperan sebagai salah satu alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan

Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Tahun 2016 mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota madya Payakumbuh
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat.
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010 – 2015

11. Peraturan Walikota Solok Nomor 26 tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
12. Keputusan walikota Solok Nomor : 188.45/413/KPTS/WSL-2013 Tanggal 29 September 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Solok Tahun 2011-2015

1.2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2008 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dalam penyelenggaraan kewenangan dimaksud diatas, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
2. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang pertanian umum
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok :

A. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

B. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, pendataan, serta evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;**
- 2) Pengelolaan dan pengkoordinasian administrasi keuangan;**
- 3) Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;**
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan**
- 5) Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan dan Rumah Tangga.**

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat di bidang pelayanan umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, yaitu pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, kepustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

- 2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan,** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat di bidang program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan yaitu pengumpulan dan inventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan.

- 3) Sub Bagian Keuangan,** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat di bidang keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi keuangan yaitu pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan keuangan.

C. Bidang Produksi dan Agribisnis, mempunyai tugas pokok melaksanakan Tugas dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibidang produksi dan agribisnis yang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan
- 2) pelaksanaan kegiatan bidang produksi tanaman pangan Holtikultura, perkebunan, peternakan perikanan dan kehutanan,
- 3) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan program produksi tanaman pangan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- 4) Pelaksanaan program pengembangan usaha tani tanaman pangan holtikultura, perkebunan, peternakan perikanan dan kehutanan

Bidang Produksi dan Agribisnis terdiri dari :

1. **Seksi Bina Produksi tanaman Pangan dan Holtikultura**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang produksi dan agribisnis khususnya tentang teknologi produksi pasca panen dan pengembangan usaha tanaman pangan dan holtikultura. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pembinaan dan peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura serta pembinaan agribisnis dan alsintan.
2. **Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang produksi dan agribisnis khususnya tentang teknologi produksi, pasca panen dan pengembangan usaha produksi peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha peternakan dan perikanan.
3. **Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang produksi dan agribisnis khususnya

tentang teknologi produksi, pasca panen dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas seksi Bina produksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pengkoordinasian, pemantauan dan pengawasan pembangunan kehutanan dan perkebunan, pemerataan teknologi sesuai tipe dan ekologi lahan dan pemanfaatannya serta penyiapan pengembangan usaha tanaman perkebunan.

D. Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibidang perlindungan tanaman dan hewan yang mempunyai fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan petunjuk dibidang penyelamatan lahan, perlindungan tanaman dan hewan serta penanggulangan penyakit;
2. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan, rencana dan program dibidang penyelamatan lahan, perlindungan, pengendalian penyakit tanaman dan hewan;
3. Pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan bidang penyelamatan lahan, perlindungan, pengendalian penyakit tanaman dan hewan;

Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan terdiri dari :

1. **Seksi Perlindungan Hewan Ternak dan Ikan,** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan khususnya tentang perlindungan hewan ternak dan ikan. Untuk menyelenggarakan tugas seksi Perlindungan Hewan Ternak dan Ikan mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pengkoordinasian dan pembinaan teknis perlindungan hewan ternak dan ikan serta pengendalian penyakit hewan ternak dan ikan
2. **Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Tanah dan Air,** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Perlindungan Tanaman dan Konservasi Tanah dan Air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Tanah dan Air mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pengkoordinasian dan pembinaan teknis

pengawasan dan penyelamatan lahan serta perlindungan tanaman dan konservasi tanah dan air.

E. Bidang penyuluhan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di bidang penyuluhan yang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan petunjuk di bidang penyuluhan, pengendalian operasional penyuluhan;
2. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan tenaga penyuluh pertanian;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluh serta mempersiapkan kelembagaan tani yang kokoh dan mandiri
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan penyuluh;

Bidang Penyuluhan terdiri dari :

1. **Seksi Penyuluhan,** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas bidang Penyuluhan, khususnya tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas seksi penyuluhan mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pengkoordinasian penyuluhan serta operasional dan pengendalian penyuluh.
2. **Seksi Kelembagaan Tani,** mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok bidang Penyuluhan khususnya tentang pengembangan dan peningkatan kelembagaan tani. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Kelembagaan tani mempunyai fungsi penyusunan rencana teknis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kelembagaan tani.

1.3 **Penghargaan**

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dari tahun sebelumnya dapat dibuktikan dari penghargaan Tingkat Nasional dan Provinsi yang diperoleh oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok pada tahun 2016 ini ,yaitu :

A. Tingkat Nasional :

1. Penghargaan Ketahanan Pangan dari Menteri Pertanian untuk peningkatan produksi Padi

B. Tingkat Provinsi Sumatera Barat

1. Juara III sapi PO betina ,dalam acara Live stock expo
2. Juara I asah terampil, dalam acara Live stock expo

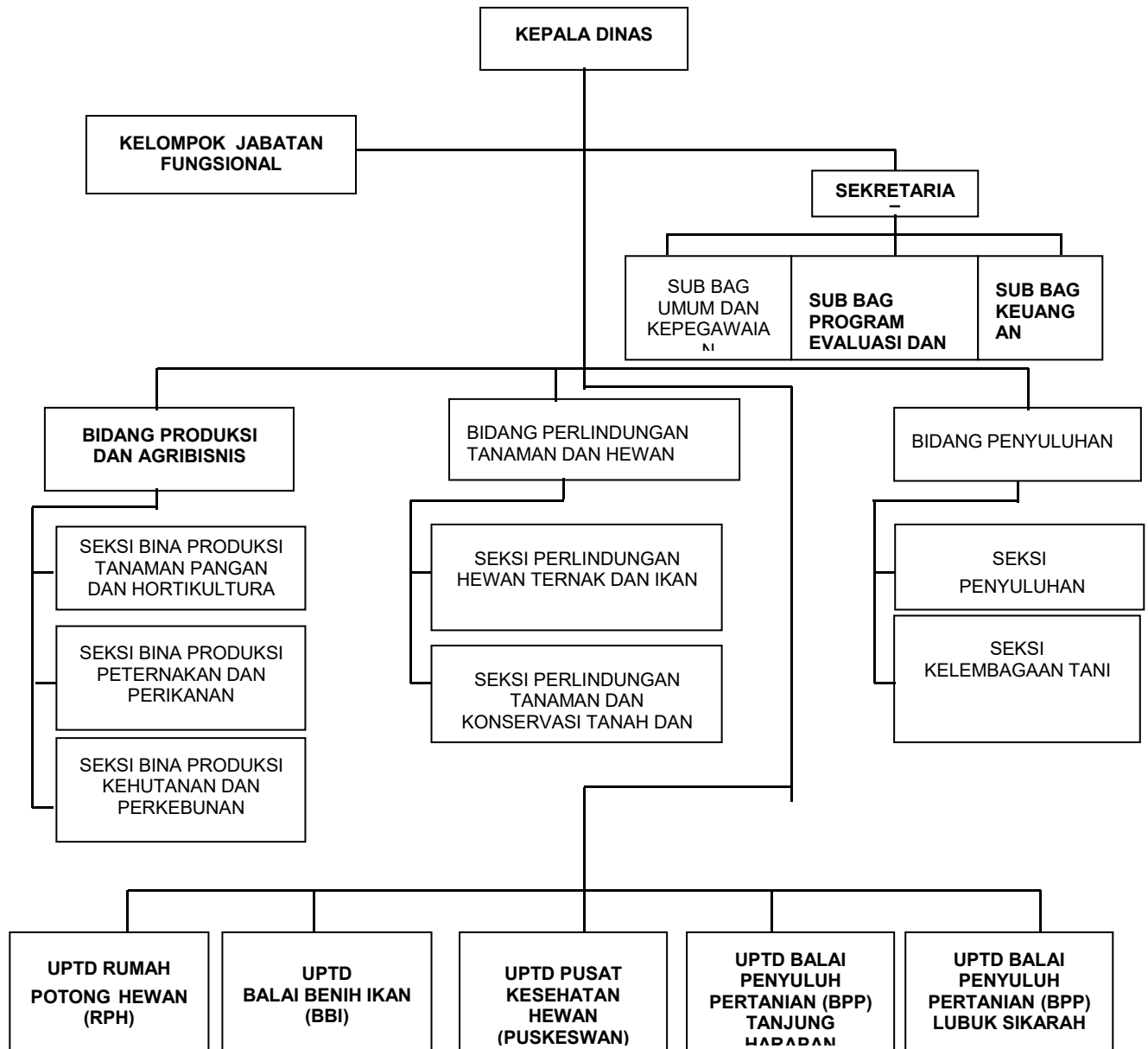
1.4 Kewenangan dan Data Umum Organisasi

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa instansi yang menangani pembangunan pertanian adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok , dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok, struktur organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Produksi dan Agribisnis, terdiri dari :
 - Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan
 - Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan
4. Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, terdiri dari:
 - Seksi Perlindungan Hewan Ternak dan Ikan
 - Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Tanah dan Air
5. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - Seksi Penyuluhan
 - Seksi Kelembagaan Tani
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (RPH)
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI)
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Lubuk Sikarah
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Tanjung Harapan
11. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA SOLOK**



Berdasarkan data keadaan 31 Desember 2016 Secara umum jumlah pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok pada tahun 2016 sebanyak 107 orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon

NO	Golongan	Jumlah (orang)	Eselon					Fungsional	Staf	CS
			II	III		IV				
			B	A	b	A	b			
1	Gol. IV									
	- IV/ a	6			1	3	1		1	
	- IV/b	4	1	1	1			1		
	- IV/c									
	- IV/d									
2	Gol. III									
	- III/a	10						1	9	
	- III/b	12						3	9	
	- III/c	14				2	3	2	7	
	- III/d	14				10	1	2	1	
3	Gol. II									
	- II/a	1							1	
	- II/b									
	- II/c	1						1		
	- II/d	1						1		
4	PTT	1							1	
5	Kontrak	15							15	
6	Honorer	28							16	12
	Total	107	1	1	2	15	5	11	60	12

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	Golongan	Jumlah (orang)	Kualifikasi Pendidikan							
			S2	S1	D4	D3	D2	SMA	SMP	SD
1	Gol. IV									
	- IV/ a	6	1	5						
	- IV/b	4	2	2						
	- IV/c									
	- IV/d									
2	Gol. III									
	- III/a	10		6		3		1		
	- III/b	12	1	6	3			2		
	- III/c	14	5	9						
	- III/d	14		12		1				
3	Gol. II									
	- II/a	1						1		
	- II/b									
	- II/c	1				1				
	- II/d	1						1		
4	PTT	1							1	
5	Kontrak	15		8		1	1	4	1	
6	Honorer	28		5		2		11	6	4
	Total	107	9	53	3	8	1	21	8	4

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok terdiri dari 4 Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS

Beriktisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja/dokumen perjanjian kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

BAB IV : PENUTUP

adalah bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran dari dokumen Laporan Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok Tahun 2016.

**LAMPIRAN : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek, maka Visi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok adalah ***“Terwujudnya Keluarga Tani Yang Sejahtera Dengan Pertanian Tangguh Yang Berwawasan Agribisnis”***.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok telah merumuskan misinya yang meliputi :

1. Meningkatkan Pendapatan Petani
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Petani
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

2.1.3 Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan

2.1.3.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian, perikanan dan Kehutanan Kota Solok adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 2 Meningkatnya Kegiatan agribisnis
- 3 Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan
- 4 Meningkatnya status kelembagaan petani
- 5 Meningkatnya kualitas pelayanan

2.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Pengembangan usaha tani terpadu
3. Meningkatnya jumlah petani/poktan yang melaksanakan kegiatan agribisnis
4. Meningkatnya jumlah petani/poktan yang melaksanakan usaha pengolahan hasil pertanian peternakan dan perikanan
5. Meningkatnya kelembagaan petani dengan berbadan hukum
6. Meningkatnya klasifikasi kemandirian poktan
7. Meningkatnya SDM petani dan pembudidaya ikan
8. Meningkatnya kualitas pelayanan disektor pertanian
9. Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi, panen dan pasca panen

Dari masing-masing sasaran ditetapkan program – program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Dibawah ini akan di gambarkan sinkronisasi antara tujuan, sasaran dan program, seperti pada tabel di bawah ini :

- | | |
|------------------|---|
| I. Misi I | : Meningkatkan Pendapatan Petani |
| Tujuan | : - Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Meningkatnya kegiatan agribisnis
- Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan. |

Sasaran	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 2. Rehabilitasi Pengembangan Tanaman Perkebunan. 3. Pengolahan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi-umbian 4. Pemasyarakatan/ Pengembangan Padi Tanam Sabatang (SL-PTS) 5. Pengembangan Tanaman Hortikultura 6. Pengembangan Budidaya Padi Organik 7. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
	2. Peningkatan produksi hasil peternakan	1. Pembibitan dan perawatan ternak 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan dan IB
	3. Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 3. Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

	4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna. 2. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna. 3. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Hasil Pertanian/ Perkebunan
	5. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	1. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
	6. Konservasi Perairan Umum	1. Peningkatan Sumber Daya Perairan Umum
	7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Pembangunan Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi 2. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
2. Meningkatnya jumlah petani/ poktan yang melaksanakan kegiatan agribisnis	1. Peningkatan kesejahteraan petani	1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 3. Peningkatan Kemampuan

		Lembaga tani 4. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur 5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Kawasan Usaha Tani Terpadu yang Berorientasi bisnis 6. Pemberdayaan Kelembagaan KTNA
	2. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1. Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	2. Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu

II. Misi III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan

Sasaran	Program	Kegiatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan di sektor pertanian	1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
	2. Pencegahan dan Penanggulangan	1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

	Penyakit Ternak	<p>Menular Ternak</p> <p>2. Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik</p> <p>3. Perlindungan Kesehatan Masyarakat veteriner</p>
	3. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan dan IB
	4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	<p>1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna</p> <p>2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna</p>
	5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	<p>1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan</p> <p>2. Peningkatan Peran Serta Saka Taruna Bumi</p> <p>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian/ Perkebunan</p> <p>4. Penyuluhan dan Sosialisasi Pembangunan Pertanian</p>
	6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	<p>1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak</p> <p>2. Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik</p> <p>3. Perlindungan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p>

7. Peningkatan Teknologi Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna 3. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat 2. Optimalisasi Lahan Terlantar dengan Tanaman Karet Terpadu Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengaman Hutan
9. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan 2. Peningkatan Konservasi Tanah dan Air
10. Perlindungan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan.

Untuk melihat penjabaran sasaran strategis yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat produktivitas, tanaman pangan <ul style="list-style-type: none"> * Padi * Ubi kayu - Tingkat produksi, tanaman pangan <ul style="list-style-type: none"> * Padi * Ubi kayu - Tingkat produktivitas, tanaman perkebunan <ul style="list-style-type: none"> * Kakao * Tanaman Atsiri - Tingkat produksi, tanaman perkebunan <ul style="list-style-type: none"> * Kakao * Tanaman Atsiri 	<ul style="list-style-type: none"> 6,93 Ton/Ha 25 Ton/Ha 15,187 Ton/Th 196,8 Ton/Th 0,95 Ton/Ha/Th 17,5 Ton/Ha/Th 199,5 Ton/Th 437 Ton/Th

		<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat produksi,peternakan <ul style="list-style-type: none"> * Populasi sapi * Populasi kambing * Populasi Unggas - Tingkat produksi perikanan <ul style="list-style-type: none"> * Produksi Ikan 	<p>2.128 Ekor</p> <p>2.061 Ekor</p> <p>209.833 Ekor</p> <p>133,21 Ton/Th</p>
2.	Meningkatnya kapasitas usaha Agribisnis	- Jumlah Usaha Agribisnis	78 Unit
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan disektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemenuhan Alsintan - Persentase pemenuhan benih unggul - Persentase cakupan layanan irigasi dan sumber-sumber air - Penyediaan jsln produksi dan jalan usaha tani 	<p>52 %</p> <p>50 %</p> <p>67 %</p> <p>6 Km</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan kepada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun bersangkutan.

Berdasarkan rencana kinerja Tahun 2016, dalam rangka mendukung 6 sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok melaksanakan 22 program dan 58 kegiatan, dengan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Berdasarkan Tabel 3.1, capaian indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat produktifitas, kualitas dan hasil produksi pertanian :
 - Padi, sasaran produktifitas, kualitas dan hasil produksi padi 6,93 ton/Ha/GKG terealisasi 6,60 ton/Ha/GKG (capaian target 95,24%), produksi padi tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Meningkatnya produksi padi tahun 2016 ini karena masyarakat Kota Solok telah menggunakan benih berlabel yang didapatkan dari bantuan dana APBN, selain itu masyarakat juga telah menerapkan sistem teknologi tanam padi jajar legowo. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok melalui Sekolah Lapang Padi Tanam Sabatang (SLPTS) terhadap kelompok kelompok tani juga ikut mendukung peningkatan hasil produksi padi tahun 2016.

TABEL.3.1
EVALUASI ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TANAMAN PANGAN,
PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian Target	Target	Realisasi	Capaian Target
1.	- Tingkat produktivitas, tanaman pangan * Padi	6,84	6,60	96,49	6,93	6,60	95,24
	* Ubi kayu	23,37	24,60	105,26	25	25	100
	- Tingkat produksi, tanaman pangan * Padi	14.420	15.178	105,26	15.946	16.170	101.4
	* Ubi kayu	190,89	196,80	103,09	200	299,20	149,6
	- Tingkat produktivitas, tanaman perkebunan * Kakao	0,90	0,90	100	0,95	0,55	57,89
	* Tanaman Atsiri	14,7	15	102.,04	17,50	15,71	89,77
	- Tingkat produksi, tanaman perkebunan * Kakao	171,85	180,90	105,27	199,50	196,35	98,42
	* Tanaman Atsiri	393,3	300	76,28	437	377	86,27
	- Tingkat produksi, peternakan * Populasi sapi	5.321	2.086	39,20	2.128	2.042	95,95
	* Populasi kambing	2.000	2.041	102,02	2.061	1.234	59,87
	* Populasi Unggas	188.849	205.719	108,93	209.833	238.856	113,83
	- Tingkat produksi perikanan * Produksi Ikan	130	130,60	100,28	133,21	191,36	143,65
		Rata-rata		95,34	Rata-rata		99,32

- Ubi Kayu, sasaran produktifitas, kualitas dan hasil produksi ubi kayu 25 ton/ha dan tercapai 100% di tahun 2016 ton/ha, produksi ubi kayu tahun 2016 juga melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh adanya kegiatan pengembangan ubi kayu yang bersumber dari dana APBD, dari kegiatan tersebut masyarakat dibantu mulai dari pengolahan lahan sampai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung budidaya ubi kayu.

- Tingkat produktifitas, kualitas, dan hasil produksi perkebunan :
 - o Untuk tanaman perkebunan, Kakao, sasaran produktifitas, kualitas dan hasil produksi Kakao terjadi penurunan dari target yang telah ditetapkan 0,95 ton/ha hanya terealisasi 0,55 ton/ha (capaian target 57,89%). Demikian juga dengan jumlah produksi yang awalnya ditargetkan 437 ton/tahun terealisasi 377 ton/tahun (capaian target 86,27%). Hal ini dikarenakan musim kemarau yang panjang di tahun 2016 sehingga mempengaruhi hasil produksi tanaman Kakao.
 - o Tanaman Atsiri, sasaran produktifitas, kualitas dan hasil produksi tanaman atsiri juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana untuk produktifitas dari target awal 17,50 ton/ha hanya bisa terealisasi 15,71 ton/ha (capaian target 89,77%) dan produksi tanaman atsiri hanya mencapai target sebanyak 86,27%. Tidak tercapainya target dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk perkembangan tanaman atsiri.

- Tingkat produksi peternakan :
 - o Populasi ternak sapi sasaran 2.128 ekor terealisasi sebesar 2.042 ekor, pencapaian target populasi ternak sapi sebesar 95,95%. Belum tercapainya target dan turunnya jumlah populasi ternak sapi dibanding tahun 2015 karena belum terpantaunya secara keseluruhan peredaran ternak-ternak yang dimiliki masyarakat. Masyarakat belum melaporkan adanya ternak yang sakit, mati dan dijual sehingga populasi ternak sulit untuk dikontrol.
 - o Hal ini juga terjadi pada populasi ternak kambing, target awal populasi sebanyak 2.061 ekor hanya tercapai sebanyak 1.234 ekor di akhir tahun 2016 (capaian target 59,87%).

- Populasi unggas di tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 dan melebihi target yang ditetapkan, capaian target 113,83%. Meningkatnya populasi ternak unggas karena adanya penumbuhan dan pengembangan kelompok peternak unggas di Kota Solok.
- Tingkat produksi hasil komoditas perikanan target 133,21 ton dan terealisasi 191,36 ton (capaian target 143,65%), tingkat produksi hasil komoditas perikanan melebihi target karena adanya peningkatan dan penumbuhan kelembagaan POKDAKAN yang diikuti dengan pemberian bantuan pada kelompok kelompok tersebut. Pembinaan terhadap Pokdakan dan kelompok PUMP-PB (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan-Perikanan Budidaya) juga ikut mendukung produksi hasil perikanan di Kota Solok.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2016 sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi setiap indikator sasaran sampai dengan 2016 dibandingkan dengan rencana sesuai dengan renstra untuk beberapa indikator capaiannya sudah memuaskan, hanya satu indikator yang capaiannya sangat rendah yaitu untuk sektor perkebunan dan tingkat populasi ternak sapi dan ternak kambing. Hal ini sudah kami jelaskan pada halaman sebelumnya, perlu upaya peningkatan rehabilitasi lahan dan kontrol yang dilakukan secara kontinu terhadap perkembangan populasi ternak yang ada.

TABEL.3.2
REALISASI AKUMULASI CAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2016	Kondisi Akhir Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
	- Tingkat produktivitas, tanaman pangan * Padi * Ubi kayu	Ton/Ha/GKG Ton/Ha	6,60 25	7,28 30	90,66 83,33
	- Tingkat produksi, tanaman pangan * Padi * Ubi kayu	Ton/th Ton/th	16.170 299	16.743 240	96,58 124,58
	- Tingkat produktivitas, tanaman perkebunan * Kakao * Tanaman Atsiri	Ton/ha Ton/Ha	0,55 15,71	1,20 22	45,83 71,41
	- Tingkat produksi, tanaman perkebunan * Kakao * Tanaman Atsiri	Ton/Th Ton/Th	196,35 377	300 1000	65,45 37,7
	- Tingkat produksi, peternakan * Populasi sapi * Populasi kambing * Populasi Unggas	Ekor Ekor ekor	2.042 1.234 238.856	2.303 2.145 227.130	88,67 57,53 105,16
	- Tingkat produksi perikanan * Produksi Ikan	Ton/th	191,36	144,19	132,71

Capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan lahan dengan komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai ekonomis dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 dapat dilihat dari capaian jumlah usaha agribisnis di Kota Solok dari 78 unit yang ditargetkan dapat tercapai 100%. Pengukuran indikator ini adalah dari capaian jumlah kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis

TABEL 3.3
EVALUASI ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KAPASITAS USAHA AGRIBISNIS

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target 2015	Realisasi	Capaian Target	Target 2016	Realisasi	Capaian Target
1.	➤ Jumlah Usaha Agribisnis	75	75	100	78	78	100
		Rata-rata		100	Rata-rata		100

Realisasi akumulasi capaian sasaran meningkatnya jumlah usaha agribisnis sampai dengan tahun ini dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi capaian kinerja pada indikator ini sampai tahun 2016 dibandingkan dengan rencana sesuai dengan renstra telah mencapai 100% sesuai dengan yang direncanakan.

TABEL 3.4
REALISASI AKUMULASI CAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA JUMLAH USAHA AGRIBISNIS

NO	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2016	Kondisi Akhir Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
	- Jumlah Usaha Agribisnis	Unit	78	87	89,65

Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Sektor Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.5.

- Capaian indikator kinerja sasaran persentase pemenuhan alsintan untuk tahun 2016 dapat dilihat dari peningkatan persentase terpenuhinya kebutuhan alsintan di Kota Solok sebanyak 105,76%. Hal ini ditentukan dengan membandingkan ketersediaan alsintan dengan kebutuhan petani.

TABEL 3.5
EVALUASI ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DISEKTOR PERTANIAN

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target 2015	Realisasi	Capaian Target	Target 2016	Realisasi	Capaian Target
1.	➤ Persentase Pemenuhan Alsintan	46,8	40	85,47	52	55	105,76
2.	➤ Persentase Pemenuhan Benih Unggul	45	40	88,88	50	50	100
3.	➤ Persentase Cakupan Layanan Irigasi dan Sumber Sumber Air	60,3	65	107,79	67	71,20	106,27
4.	➤ Penyediaan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani	5,4	5	92,59	6	7,90	131,66

- Untuk persentase pemenuhan benih unggul dari target yang ditetapkan sebanyak 50% dapat dipenuhi sebanyak 100%. Kondisi ini sudah jauh meningkat jika dibandingkan dengan pemenuhan benih unggul di tahun 2015. Adanya bantuan benih unggul menjadi pendukung dalam meningkatnya pemenuhan benih unggul di Kota Solok.
- Cakupan layanan irigasi dan sumber sumber air, pemenuhan kebutuhannya mencapai 106,72% dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan adanya

kegiatan pembangunan irigasi sehingga jaringan irigasi desa (JIDES) dan Jaringan tingkat Usaha Tani (JITUT) dapat berfungsi dengan baik untuk pengembangan pertanian. Selain jaringan irigasi, untuk ketersediaan air juga didukung kegiatan pembangunan embung dan penampung air lainnya.

Cakupan Realisasi akumulasi capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Disektor Pertanian sampai dengan tahun ini dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.6.

TABEL.3.6
REALISASI AKUMULASI CAPAIAN SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DISEKTOR PERTANIAN

NO	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2016	Kondisi Akhir Renstra SKPD	Persentase Capaian Kinerja
	➤ Persentase Pemenuhan Alsintan	%	55	100	55
	➤ Persentase Pemenuhan Benih Unggu	%	50	70	71,42
	➤ Persentase Cakupan Layanan Irigasi dan Sumber Sumber Air	%	71,20	80	89
	➤ Penyediaan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani	%	7,9	10	79

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi setiap indikator sasaran sampai dengan 2016 dibandingkan dengan rencana sesuai dengan renstra telah dapat dicapai dengan baik dengan capaian rata rata diatas 100% sesuai dengan yang direncanakan.

3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2015 terlihat pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7.
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015

No	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja		% Naik/ Turun
			2015	2016	
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	- Tingkat produktivitas, tanaman pangan * Padi * Ubi kayu	96,49 105,26	95,24 100	(1,25) (5,26)
		- Tingkat produksi, tanaman pangan * Padi * Ubi kayu	105,26 103,09	101,4 149,6	(3,86) 46,51
		- Tingkat produktivitas, tanaman perkebunan * Kakao * Tanaman Atsiri	100 102,04	57,89 89,77	(42,11) (12,27)
		- Tingkat produksi, tanaman perkebunan * Kakao * Tanaman Atsiri	105,27 76,28	98,42 86,27	(6,85) 9,99
		- Tingkat produksi, peternakan * Populasi sapi * Populasi kambing * Populasi Unggas	39,20 102,02 108,93	95,95 59,87 113,83	56,75 42,15 (4,90)
		- Tingkat produksi perikanan * Produksi Ikan	100,28	143,65	43,37
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Agribisnis	➤ Jumlah Usaha Agribisnis	100	100	0
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Disektor Pertanian	➤ Persentase Pemenuhan Alsintan	85,47	105,76	20,29
		➤ Persentase Pemenuhan Benih Unggul	88,88	100	11,12
		➤ Persentase Cakupan Layanan Irigasi dan Sumber Sumber Air	107,79	106,27	(1,52)
		➤ Penyediaan Jalan	92,59	131,66	39,07

		Produksi dan Jalan Usaha Tani			
--	--	-------------------------------	--	--	--

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan alokasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2016, realisasi SPJ (keuangan) dapat dilihat pada Tabel 3.8.

TABEL 3.8
REALISASI SPJ DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2016

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran		%
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	8. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	105.724.000,-	42.848.480,-	40,53
			9. Rehabilitasi Pengembangan Tanaman Perkebunan.	122.739.000,-	105.624.500,-	86,06
			10. Pengolahan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi-umbian	24.677.500,-	19.332.500,-	78,34
			11. Pemasyarakatan /Pengembangan Padi Tanam Sabatang (SL-PTS)	228.525.000,-	185.755.500,-	81,28
			12. Pengembangan Tanaman Hortikultura	153.360.000,-	135.450.000,-	88,32

			13. Pengembangan Budidaya Padi Organik	43.095.500,-	34.713.000,-	80,55
			14. Pemberdayaan Petani Pemakai Air	80.977.000,-	69.227.000,-	85,49
		2. Peningkatan produksi hasil peternakan	3. Pembibitan dan perawatan ternak	56.199.000,-	49.553.000,-	88,17
			4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan dan IB	184.137.500,-	159.890.000,-	86,83
		5. Pengembangan Budidaya Perikanan	4. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	199.415.000,-	196.563.400,-	98,57
			5. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	154.235.000,-	139.437.000,-	90,41
			6. Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	1.635.270.000	1.378.490.000	84,30
		7. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	1. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	24.636.500,-	17.776.500,-	72,16
		8. Konservasi Perairan Umum	1. Peningkatan Sumber daya Peraian Umum	18.285.500,-	17.078.500,-	93,40
		9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	3. Pembangunan Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi	741.578.400,-	737.355.000,-	99,43

			4. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.097.953.200	2.177.796.825	70,30
			5. Pembangunan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	641.130.000,-	626.267.000,-	97,68
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha Agribisnis	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani	7. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	36.140.000,-	29.007.000,-	80,26
			8. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	134.335.000,-	120.685.000,-	89,84
			9. Peningkatan Kemampuan Lembaga tani	152.101.500,-	89.761.000,-	59,01
			10. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	169.275.750,-	160.777.750,-	94,98
			11. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Kawasan Usaha Tani Terpadu yang Berorientasi bisnis	189.426.000,-	185.562.000,-	97,96
			12. Pemberdayaan Kelembagaan KTNA	48.718.500,-	33.318.800,-	68,39
		2. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1. Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	185.440.500,-	148.938.261,-	80,32

		3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu	50.000.000,-	0	0
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Disektor Pertanian	1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	36.024.000,-	32.428.000,-	90,02
		2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	132.153.000,-	116.156.850,-	87,90
			5. Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik	82.885.000,-	58.806.900,-	70,95
			6. Perlindungan Kesehatan Masyarakat veteriner	190.076.000,-	149.518.265,-	78,66
		3. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Pengadaan sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan dan IB	184.137.500,-	159.890.000,-	86,83
		7. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	392.063.000,-	384.875.000,-	98,17
			4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana	140.394.500,-	126.390.000,-	90,02

			Teknologi Pernakan Tepat Guna			
			5. Pelatihan dan Bimbingan PengoperasianTe knologi Pernakan Tepat Guna	17.860.000,-	15.088.500,-	84,48
		8. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	87.603.000,-	61.546.500,-	70,26
			6. Peningkatan Peran Serta Saka Taruna Bumi	23.820.000,-	5.977.000,-	25,09
			7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	498.840.400,-	461.309.000,-	92,48
			8. Penyuluhan dan Sosialisasi Pembangunan Pertanian	182.235.000,-	130.591.500,-	71,66
		9. Pencegahan dan Penanggulang -an Penyakit Ternak	4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	132.153.000,-	116.156.850,-	87,90
			5. Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	82.885.000,-	58.806.900,-	70,95
			6. Perlindungan Kesehatan Masyarakat Veteriner	190.076.000,-	149.518.265,-	78,66

		10. Peningkatan Teknologi Peternakan	4. Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 5. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna 6. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	392.063.000,- 140.394.500,- 17.860.000,-	384.875.000,- 126.390.000,- 15.088.500,-	98,17 90,02 84,48
		11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4. Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat 5. Optimalisasi Lahan Terlantar dengan Tanaman Karet Terpadu Lainnya 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengaman Hutan	168.685.000,- 50.500.000,- 175.678.000,-	123.920.000,- 36.975.000,- 150.570.000,-	73,46 73,22 85,71
		12. Pembinaan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai	1. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil	25.102.500,-	23.442.500,-	93,39

		Pengelolaan Industri Hasil Hutan	Hutan			
		13. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	66.476.000,-	64.614.000,-	97,20
			4. Peningkatan Konservasi Tanah dan Air	144.310.000,-	142.142.350,-	98,50
4.	Tersedianya prasarana dan sarana pelayanan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dan kelembagaan tani	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.094.500,-	3.094.500,-	100
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.980.000,-	172.469.607,-	73,09
			3. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	33.000.000,-	33.000.000,-	100
			4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	169.800.000,-	169.800.000,-	100
			5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.948.500,-	42.862.000,-	99,80
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.992.000,-	25.827.800,-	99,37
			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.290.000,-	13.279.500,-	99,92

			8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.115.000,-	31.000.000,-	99,63
			9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.239.000,-	83.275.500,-	98,86
			10. Penyediaan Makanan dan Minuman	21.428.000,-	21.426.500,-	99,99
			11. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	388.612.000,-	364.804.926,-	93,87
			12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	314.900.000,-	252.007.250,-	80,03
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Mobiler Kantor	18.877.500,-	16.220.000,-	85,92
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	409.200.000,-	405.448.000,-	99,08
				444.187.600,-	365.049.700,-	82,18
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	55.525.000,-	44.939.400,-	80,94
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			

		3. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	69.000.000,-	69.000.000,-	100
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan Formal	88.600.000,-	74.135.850,-	83,67
		5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	3.718.500,-	3.470.000,-	93,32

Dari Tabel 3.8 di atas terlihat bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak terealisasi keuangannya, yakni pada kegiatan Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu. Hal ini disebabkan karena alat pengolahan yang diperlukan/ dipesan tidak tersedia sehingga kegiatan ini tidak dapat direalisasikan.

Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 65%, diantaranya:

- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Rendahnya realisasi kegiatan ini karena tidak terealisasinya salah satu keluaran yakni pemasaran padi anak dari. Hal ini akibat adanya kesalahan pada nomor rekening dari kegiatan dimaksud sehingga anggaran tidak dapat dicairkan.

- Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Belum tercapainya target realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan karena tidak masuknya permohonan dari kelompok tani untuk mendapatkan fasilitas BOP selain itu ada beberapa kelompok yang telah mengajukan permohonan namun tidak dilengkapi persyaratan administrasinya sehingga tidak dapat dibayarkan

- Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Hal ini dikarenakan kegiatan pendampingan oleh tim ahli tidak jadi terlaksana karena penanaman baru terlaksana pada akhir tahun akibat musim kemarau yang panjang
- Peningkatan Peran Sakka Taruna Bumi
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena belum adanya undangan untuk anggota sakka taruna bumi dalam mengikuti perkemahan sehingga kegiatan yang telah dianggarkan ini batal untuk diikuti.

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan kegiatan dan guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Solok di dukung oleh 5 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yakni, UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), UPTD Rumah Potong Hewan (RPH), UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lubuk Sikarah dan UPTD Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tanjung Harapan.. Dimana masing masing UPTD memiliki tenaga teknis (SDM) yang kompeten di bidangnya masing masing. UPTD UPTD inilah yang menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan adanya spesifikasi pelayanan melalui UPTD UPTD yang ada, kegiatan/pelayanan yang diberikan pada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal. Selain melakukan pelayanan, melalui UPTD ini bisa didapatkan informasi permasalahan/kebutuhan masyarakat khusus di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, sehingga dapat dihimpun, diakomodir dan di carikan solusinya melalui program dan kegiatan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, tidak saja diberikan dilingkungan kantor tetapi juga dilakukan dengan terjun langsung ke tengah masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Kerja sama antara petugas teknis, petugas lapangan/penyuluh dan seluruh pegawai Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Solok dapat mewujudkan tercapainya sasaran kinerja yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok disusun sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan SKPD. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mencermati capaian kinerja baik terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dapat dicapai dengan baik. Dimana hal tersebut telah mengacu pada terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Dari pengukuran kinerja kegiatan pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan memperlihatkan efisiensi terutama dalam penggunaan dana dan sarana

penunjang, demikian juga jika dilihat dari pengukuran pencapaian sasaran , telah mencapai target sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Namun demikian ke depan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok akan tetap berusaha lebih baik dan akan selalu berupaya meningkatkan kinerja.

4.2. Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Usaha pembangunan pertanian masih memerlukan pembenahan khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Perlu pendataan dan identifikasi permasalahan yang lebih tepat dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.
 - b. Kerjasama dengan pihak swasta, perbankan dan mitra pertanian yang lainnya perlu ditingkatkan.
 - c. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam usaha tani, diperlukan peningkatan SDM petani dan kerjasama sepenuhnya dari seluruh stakeholder terutama tekad dari pemuka masyarakat..
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodek agar capaian kinerja dapat maksimal

